

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA GUGAT CERAI DAN CERAI TALAK
TENTANG PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI ISTRI
PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH PERADILAN AGAMA
KALIMANTAN SELATAN**

DISERTASI

**OLEH:
LISMIATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA GUGAT CERAI DAN CERAI TALAK
TENTANG PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI ISTRI
PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH PERADILAN AGAMA
KALIMANTAN SELATAN**

Disertasi

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
Ilmu Syariah

Oleh:

Lismiati

NIM. 190311020063

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJAN
S-3 ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lismiati
NIM : 190311020063
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 01 Januari 1976
Program Studi : Ilmu Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya yang berjudul: **“Analisis Putusan Perkara Gugat Cerai dan Cerai Talak Tentang Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Istri Pasca Perceraian di Wilayah Kalimantan Selatan”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Juni 2026
Yang membuat pernyataan

A 10000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '95A44ANX417191540' is visible at the bottom of the stamp.

Lismiati

LEMBAR BUKTI BEBAS PLAGIASI

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME 1552/Un.14/IV/UPM-BP/05/2026	
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat https://www.turnitin.com , dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:	
Nama	: Lismiati
NIM	: 190311020063
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Analisis Putusan Perkara Gugat Cerai dan Cerai Talak di Wilayah Peradilan Agama Kalimantan Selatan
tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20% Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian TERBUKA . Banjarmasin, 26 Mei 2026	
Wakil Direktur Pascasarjana	
 	 
D. Wahyudin, M.Pd.I.	

PERSETUJUAN DISERTASI

**PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM
DOKTOR**

**ANALISIS PUTUSAN PERKARA GUGAT CERAI DAN CERAI TALAK
TENTANG PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI ISTRI
PASCA PERCERAIAN DI WILAYAH PERADILAN AGAMA
KALIMANTAN SELATAN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

LISMIATI

NIM. 190311020063

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk

Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

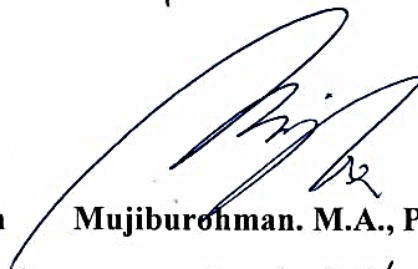
Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum

Tanggal, 19, Mei, 2026

Pembimbing II



Mujiburehman, M.A., Ph.D

Tanggal, 19, Mei, 2026

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul “Analisis Putusan Perkara Gugat Cerai Dan Cerai Talak Tentang Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Istri Pasca Perceraian di Wilayah Peradilan Agama Kalimantan Selatan” ditulis oleh Lismiati NIM. 190311020063 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Juni 2026

Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
NIP. 197112091996031001

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA (Ketua Penguji)	1.
2. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Penguji Utama)	2.
3. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum (Anggota)	3.
4. Dr. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H (Penguji Eksternal)	4.
5. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H (Anggota)	5.
6. Mujiburohman. M.A., Ph.D (Anggota)	6.
7. Dr. H. Nuril Khasyi'in Lc, MA (Sekretaris)	7.

ABSTRAK

Lismiati, NIM. 190311020063. “*Analisis Putusan Perkara Gugat Cerai Dan Cerai Talak Tentang Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Istri Pasca Perceraian di Wilayah Peradilan Agama Kalimantan Selatan*”. Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., dan Mujiburohman. M.A., Ph.D., pada Program Studi Doktorat Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Cerai, Mut’ah, Nafkah Iddah, Perlindungan Hukum, Keadilan.*

Latar belakang penelitian ini adalah ketidakjelasan normatif KHI Pasal 149 yang hanya mengatur *mut’ah* dan nafkah *iddah* pada cerai talak, sementara SEMA No. 2 Tahun 2019 mendorong pemberian hak tersebut pada cerai gugat untuk lindungi istri, menimbulkan konflik norma dan ketidakseragaman putusan hakim di Peradilan Agama Kalimantan Selatan. Penelitian ini menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama wilayah Kalimantan Selatan terkait pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah*, menguji konsistensi serta kesesuaiannya dengan dua peraturan di atas, serta menilai implikasinya terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi istri pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan studi kasus, pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Data dalam penelitian ini berupa dua puluh putusan Pengadilan Agama di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari tahun 2024, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode argumentasi hukum dan penafsiran terhadap norma yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertimbangan hukum hakim dibangun secara sistematis melalui tahapan verifikasi formil, rekonstruksi fakta, pembuktian, evaluasi mediasi, subsumsi norma, dan penetapan akibat hukum berupa *mut’ah* dan nafkah *iddah*. Dalam cerai talak, kewajiban tersebut secara eksplisit merujuk pada Pasal 149 KHI, sedangkan dalam cerai gugat hakim menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis untuk tetap menjatuhkan kewajiban tersebut demi keadilan substantif. Secara normatif, pertimbangan hakim konsisten merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 KHI Tahun 2018 serta selaras dengan parameter *marital breakdown* dalam praktik peradilan sebagaimana dipahami dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Dalam perspektif teori keadilan, pertimbangan hakim mencerminkan keadilan distributif melalui pemberian hak secara proporsional serta keberpihakan terhadap pihak yang lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Dari perspektif teori perlindungan hukum, putusan-putusan tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan represif bagi istri pasca perceraian. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam kedalaman pertimbangan mengenai penentuan besaran *mut’ah* dan nafkah *iddah* serta mekanisme pelaksanaannya, sehingga diperlukan penguatan standar argumentasi guna meningkatkan konsistensi dan efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca-perceraian di peradilan agama.

ABSTRACT

Lismiati, NIM. 190311020063. “*Analysis of Judicial Decisions in Divorce Lawsuits and Talaq Divorce Cases Concerning the Protection of Rights and Obligations for Wives After Divorce within the Religious Courts of South Kalimantan.*” Supervised by M. Hanafiah, M.Hum., and Mujiburohman, M.A., Ph.D., in the Doctoral Program of Islamic Law, Postgraduate Program, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Keywords: *Divorce, Mut’ah, Iddah Maintenance, Legal Protection, Justice.*

The background of this study is the normative ambiguity of Article 149 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which only regulates mut’ah and iddah maintenance in cases of divorce initiated by the husband (cerai talak), while Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2019 encourages the granting of such rights in cases of divorce initiated by the wife (cerai gugat) to protect women’s interests. This situation creates a normative conflict and inconsistency in judicial decisions within the Religious Courts of South Kalimantan. This study analyzes the construction of judges’ legal reasoning in divorce cases (cerai gugat and cerai talak) within the Religious Courts of South Kalimantan concerning the awarding of mut’ah and iddah maintenance, examines the consistency and conformity of such decisions with the two aforementioned regulations, and assesses their implications for the principles of legal protection and justice for women after divorce. This research is a normative-empirical legal study with a case study approach, employing legal sociology and statutory approaches. The data consist of twenty court decisions from the Religious Courts of Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, and Pelaihari in 2024, which were analyzed qualitatively using legal argumentation methods and interpretation of relevant norms.

The findings show that the judges’ legal reasoning is systematically constructed through stages of formal verification, factual reconstruction, evidentiary assessment, mediation evaluation, legal subsumption, and the determination of legal consequences in the form of mut’ah and iddah maintenance. In cases of divorce initiated by the husband, these obligations explicitly refer to Article 149 of the KHI, whereas in divorce initiated by the wife, judges employ systematic and teleological interpretation to still impose such obligations in the interest of substantive justice. Normatively, judicial reasoning consistently refers to Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law, Article 19 of Government Regulation No. 9 of 1975, and Article 116 of the 2018 KHI, and is aligned with the marital breakdown parameter in judicial practice as understood in SEMA No. 2 of 2019. From the perspective of justice theory, judicial considerations reflect distributive justice through the proportional allocation of rights and a tendency to favor the party that is socially and economically more vulnerable. From the perspective of legal protection theory, these decisions function as an instrument of repressive legal protection for women after divorce. Nevertheless, variations are found in the depth of judicial reasoning regarding the determination of the amount of mut’ah and iddah maintenance as well as its implementation mechanisms, indicating the need for strengthened standards of legal argumentation to improve consistency and effectiveness of legal protection.

This study emphasizes the importance of integrating legal certainty, substantive justice, and legal protection for women after divorce within the religious court system..

المُلخَصُ

لبسمياتي، رقم القيد: 190311020063». تحليل الأحكام القضائية في دعاوى الطلاق والطلاق بالتطبيق بشأن حماية حقوق وواجبات الزوجة بعد الطلاق في نطاق المحاكم الشرعية بجنوب كاليمانتان. «تحت إشراف الأستاذ الدكتور الحاج محمد حنفيه، الماجستير في العلوم الإنسانية، ومجيب الرحمن، الماجستير، الدكتوراه، في برنامج الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، الدراسات العليا بجامعة أُنساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، سنة ٢٠٢٦ م.

الكلمات المفتاحية: الطلاق، نفقة المتعة، نفقة العدة، الحماية القانونية، العدالة (KHI)، تتمثل خلفية هذه الدراسة في الغموض المعياري للمادة 149 من مجموعة الأحكام الشرعية التي تنظم فقط المتعة ونفقة العدة في حالات الطلاق الذي يقع بإرادة الزوج (الطلاق الرجعي/الطلاق من جهة رقم 2 لعام 2019 يشجع على منح هذه الحقوق في (SEMA) الزوج)، في حين أن تعميم المحكمة العليا حالات الطلاق الذي تطلبه الزوجة (دعوى الطلاق (لحماية حقوق المرأة. ويؤدي هذا الوضع إلى تعارض معياري وعدم توحيد في الأحكام القضائية داخل المحاكم الشرعية في كاليمانتان الجنوبية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل بناء تعليل القضاة في قضايا الطلاق) سواء دعوى الطلاق أو الطلاق الرجعي (في المحاكم الشرعية في إقليم كاليمانتان الجنوبية فيما يتعلق بمنح المتعة ونفقة العدة، واختبار مدى اتساق هذه الأحكام وتوافقها مع التنظيمين المذكورين، وكذلك تقييم آثارها على مبدأ الحماية القانونية والعدالة للمرأة بعد الطلاق. تُعد هذه الدراسة بحثًا قانونيًا معياريًا-تجريبيًا يعتمد على دراسة الحالة، مع استخدام منهج سوسولوجيا القانون والمنهج التشريعي. وتتمثل بيانات الدراسة في عشرين حكمًا صادرة عن المحاكم الشرعية في بنجرماسين، وبنجر بارو، ومارتابورا، وبلهاييلي خلال عام 2024، وتم تحليلها تحليلًا نوعيًا باستخدام منهجية التعليل القانوني وتفسير القواعد القانونية ذات الصلة.

وتُظهر نتائج الدراسة أن بناء التعليل القضائي يتم بصورة منهجية من خلال مراحل التحقق الشكلي، وإعادة بناء الوقائع، والإثبات، وتقييم الوساطة، وإعمال القاعدة القانونية على الوقائع، وتحديد الآثار القانونية المتمثلة في المتعة ونفقة العدة. وفي حالات الطلاق الرجعي، يتم الاستناد بشكل صريح إلى المادة 149 من مجموعة الأحكام الشرعية، بينما في حالات دعوى الطلاق يستخدم القضاة التفسير المنهجي والغائي لإقرار هذه الحقوق تحقيقًا للعدالة الموضوعية. ومن الناحية المعيارية، يستند التعليل القضائي بصورة متسقة إلى المادة 39 الفقرة من قانون الزواج، والمادة 19 من اللائحة الحكومية رقم 9 لسنة 1975، والمادة 116 من مجموعة الأحكام (2) في الممارسة (*marital breakdown*) الشرعية لعام 2018، كما يتوافق مع معيار انهيار العلاقة الزوجية القضائية كما ورد في التعميم رقم 2 لعام 2019. ومن منظور نظرية العدالة، تعكس اعتبارات القضاة العدالة التوزيعية من خلال منح الحقوق بشكل متناسب وإيلاء اهتمام خاص للطرف الأكثر ضعفًا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. ومن منظور نظرية الحماية القانونية، تُعد هذه الأحكام وسيلة لحماية قانونية رادعة لصالح

المرأة بعد الطلاق. ومع ذلك، لوحظ وجود تباين في عمق التعليل القضائي فيما يتعلق بتحديد مقدار المتعة ونفقة العدة وآليات تنفيذها، مما يستدعي تعزيز معايير التعليل القانوني لضمان مزيد من الاتساق وفعالية الحماية القانونية. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية دمج اليقين القانوني والعدالة الموضوعية والحماية القانونية للمرأة بعد الطلاق في نظام القضاء الشرعي.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas hidayah, inayah, dan taufik-Nya sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sang teladan, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat pecinta ilmu dan penegakkan Agama Islam hingga hari Akhir.

Disertasi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Syariah pada jenjang S3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Selama proses penyelesaian disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan arahan. Pada kesempatan ini kiranya pantas penulis sembahkan penghargaan dan ucapan terima kasih tak terhingga, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum., dan Bapak Mujiburohman. M.A., Ph.D selaku pembimbing yang selalu memberikan perhatian, bimbingan, dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan disertasi ini.

4. Ibu Prof. Dr. Gusti Muzainah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S3 Ilmu Syariah yang dengan seksama memberikan arahan yang sangat bermanfaat, dan Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., selaku Sekretaris Prodi S3 Ilmu Syariah yang telah memberikan masukan dan arahan untuk penyelesaian disertasi ini.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada suami tercinta Supriyadi. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, doa, serta dukungan moral dan spiritual yang tidak pernah putus selama proses panjang studi ini. Kehadiran dan ketulusanmu menjadi salah satu penopang utama dalam menjaga semangat dan keteguhan penulis, terutama pada saat-saat penuh tantangan dan keterbatasan. Tanpa dukungan tersebut, penyelesaian disertasi ini tidak akan berjalan dengan sebaik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam kehidupan kita, serta menjadikan segala pengorbanan ini sebagai amal yang bernilai ibadah di sisi-Nya.
8. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada anak-anak tercinta Hafid Bagus Perdana, Antika Khairiyah, Samiul Nisa. Kalian adalah sumber

kekuatan, cinta, dan motivasi terbesar dalam setiap langkah perjalanan ini. Di tengah keterbatasan waktu dan perhatian karena tuntutan akademik, kalian tetap menjadi alasan utama penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, membimbing, dan memberikan kebahagiaan kepada kalian semua, serta menjadikan kalian anak-anak yang saleh dan salehah.

9. Serta penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Syariah angkatan 2019 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan keberkahan bagi semuanya yang telah memberikan sumbangsih secara moril maupun materiil kepada penulis. Penulis pun menyadari taka da kata sempurna dalam penulisan disertasi ini, untuk itu penulis penuh harap adanya koreksi ataupun masukan dari para pembaca untuk perbaikan ke depan. Besar harapan semoga disertasi ini memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak terkait, Aamiin.

Banjarmasin, Maret 2026
Penulis,
Lismiati
NIM. 190311020063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s'a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

هتكَ َوّ	Ditulis	Mutakabbir
القدوس	Ditulis	al-qudu>s

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	ja>mi'ah
مكتبة	Ditulis	Maktabah

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	al-maktabah al-jami>lah
-----------------	---------	-------------------------

IV. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulisditulis	a> ka>milah
2	fathah + ya mati صلى	ditulisditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulisditulis	i> syadi>d
4	dammah + wawu mati صدر	ditulisditulis	u> s}udu>r

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويّد	ditulisditulis	ai ruwaidun
2	fathah + wawu mati وَفِرْعَوْنِ ذِي الْاَوْتَادِ	ditulisditulis	au wa fir'auna z\i al-auta>d

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	a'antum asyaddu khalqan
--------------------------	---------	-------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	al-Qur'a>n
الكتاب	Ditulis	al-kita>b

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصّبح	Ditulis	as}-s}ubh}u
السّاهرة	Ditulis	as-sa>hirah

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بِرِ الْوَالِدَيْنِ	Ditulis	birru al-wa>lidaini
إِذَا الشَّمْسُ	Ditulis	Iz\ a asy-syamsu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
LEMBAR BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN DISERTASI	iv
PENGESAHAN DISERTASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
المُلخَص	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Teori	22
G. Sistematikan Penulisan	41

BAB II KAJIAN TEORITIS KONSEP CERAI DALAM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Konsep Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	43
1. Konsep Dasar Cerai Talak	43
2. Konsep Dasar Cerai Gugat.....	51
3. Perbedaan Antara Cerai Talak dan Cerai Gugat dalam Hukum Islam dan Peradilan Agama.....	56
4. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian	59
B. Sistem Peradilan Agama di Indonesia	61
1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	61
2. Kewenangan Pengadilan Agama.....	88
3. Proses Berperkara di Pengadilan Agama	93
C. Aspek Hukum dalam Perkara Cerai.....	94
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim.....	101

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	106
B. Desain Penelitian	108
C. Sumber Data	110
D. Teknik Pengumpulan Data	112
E. Teknik Analisis Data.....	112

BAB IV KARAKTERISTIK PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN, BANJARBARU, MARTAPURA DAN PELAIHARI

A. Jumlah dan Jenis Perkara yang Diajukan.....	114
1. Pengadilan Agama Banjarmasin	114
2. Pengadilan Agama Banjarbaru.....	116
3. Pengadilan Agama Martapura.....	118
4. Pengadilan Agama Pelaihari	119
B. Profil Pihak yang Terlibat dalam Perkara	122
C. Alasan dan Tuntutan dalam Perkara	124
D. Studi Kasus Empiris dalam Perkara Gugat Cerai dan Cerai Talak di Wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan.....	165
E. Durasi Penyelesaian Perkara	201
F. Analisis Komparatif Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelaihari.....	203

BAB V ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK DI KALIMANTAN SELATAN

A. Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Dan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelaihari Terkait Pemberian Nafkah <i>Mut'ah</i> , Nafkah <i>Iddah</i> Dan Nafkah <i>Madhiyah</i>	210
1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.....	210
2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru	213
3. Putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura	216
4. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari.....	219
B. Konsistensi dan Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak	233
C. Implikasi Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Prinsip Perlindungan Hukum dan Keadilan bagi Istri Pasca Perceraian	288

BAB VI PENUTUP 297

A. Kesimpulan	297
B. Saran.....	300

DAFTAR PUSTAKA 301

LAMPIRAN-LAMPIRAN 310

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 317

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Profil Pihak yang Berperkara	122
Tabel 4. 2 Studi Kasus Empiris dalam Perkara Gugat Cerai dan Cerai Talak di Wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan	198
Tabel 4. 3 Durasi Penyelesaian Perkara	201
Tabel 4. 4 Analisis Komparatif Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelayari	208
Tabel 5. 1 Konstruksi Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Wilayah Kalimantan Selatan Terkait Pemberian <i>Mut'ah</i> Dan Nafkah <i>Iddah</i>	226
Tabel 5. 2 Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan	274